

BAB II
KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI
BARACK OBAMA TERHADAP DEMOKRATISASI LIBYA

Terpilihnya Barack Obama pada tahun 2008 sebagai Presiden ke-44 Amerika Serikat, membawa harapan baru untuk perbaikan politik luar negeri Amerika Serikat tampak lebih cerah ke depannya. Setelah pada masa pemerintahan Bush citra Amerika Serikat mengalami kemunduran akibat *doctrine war on terror*, terutama bagi negara-negara Islam yang diduga sebagai negara pendukung teroris. Kehadiran Obama menjadi kesempatan baik untuk memulihkan reputasi Amerika Serikat di mata dunia. Oleh karena itu, Obama kemudian melakukan reformasi terhadap politik luar negeri Amerika Serikat melalui perbaikan hubungan dengan negara-negara muslim (Joseph S. Nye, 2012, hal. 106).

Di penghujung tahun 2010 hingga awal tahun 2011, konflik pergolakan politik yang bergulir di Timur Tengah dan kawasan Afrika Utara atau dikenal dengan *Arab Spring* mendorong pemerintahan Obama untuk mengonseptkan strategi arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Terlebih pada Libya yang memiliki intensitas gelombang pergolakan revolusi lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain seperti Mesir dan Tunisia (Yon Machmudi, 2016, hal. 154). Libya yang dikenal sebagai negara anti Barat terutama dengan Amerika Serikat dan sejak lama telah menjadi musuh merupakan target penting dalam kebijakan demokratisasi di kawasan tersebut. Obama menginginkan adanya perubahan terhadap dinamika hubungan Amerika Serikat dalam mengupayakan

langkah-langkah mewujudkan gerakan reformasi dan demokrasi di negara-negara kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (Alan Silverleib, 2011).

Berlandaskan pada penjelasan yang telah dibangun dalam latar belakang dan landasan konseptual pada bab sebelumnya. Pada bab ini, penelitian ini akan berupaya melihat bagaimana strategi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, peranan serta pengaruhnya dalam mewujudkan demokrasi di Libya sebagai salah satu negara di Afrika Utara yang terkena efek domino dari *Arab Spring*. Pembahasan bab ini akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai kondisi Libya dan dinamika hubungan Amerika Serikat dan Libya serta kebijakan politik luar negeri Obama ke Libya sebelum revolusi. Kemudian bagian kedua bab ini akan menjelaskan mengenai kebijakan politik luar negeri Obama terhadap demokratisasi di Libya pada saat berlangsungnya gejolak *Arab Spring* dan pasca revolusi serta melihat kondisi Libya setelah revolusi.

2.1. LIBYA SEBELUM REVOLUSI

Sebelum masa pemerintahan Qadhafi, Libya merupakan sebuah negara yang sangat bergantung dengan bantuan asing dan dekat dengan Barat. Keadaan kemudian berubah ketika Qadhafi berhasil mengambil alih kekuasaan Raja Idris pada tahun 1969. Di bawah kepemimpinan Qadhafi, Libya mengalami reformasi. Berbagai upaya kebijakan reformasi dilakukan Qadhafi untuk membuat Libya lebih baik dan membangun citra baik kepada masyarakat Libya, seperti menentang kolonialisme dan imperialisme, memperbaiki kondisi domestik dan membentuk sistem yang berorientasi pada nasionalisme Arab, dan Islam (Yon Machmudi, 2016, hal. 122).

Sub bab pertama pada bab ini akan menjelaskan mengenai kondisi Libya sebelum revolusi yang berada di bawah pemerintahan Qadhafi. Sub bab ini akan terbagi menjadi dua, yaitu bagian pertama akan memaparkan mengenai kondisi Libya selama pemerintahan Qadhafi dan dinamika hubungan Libya dengan Amerika Serikat sebelum revolusi. Kemudian bagian kedua akan lebih fokus menjelaskan mengenai reformasi hubungan dan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Libya selama masa transisi pemerintahan dari Bush ke Obama.

2.1.1. Kondisi Libya Sebelum Revolusi Di Bawah Pemerintahan Qadhafi

Keberhasilan Qadhafi mengambil alih kekuasaan pemerintahan Raja Idris pada tahun 1969 telah mengubah hubungan Amerika Serikat dan Libya. Relasi kedua negara yang sebelumnya berjalan sangat baik dan bersahabat beralih menjadi hubungan konfliktual yang berkepanjangan. Qadhafi sangat anti terhadap Barat terutama Amerika Serikat yang dianggap sebagai pendukung kapitalisme di dunia. Di awal masa pemerintahannya Qadhafi berusaha menyingkirkan semua ideologi dan pengaruh-pengaruh yang berbau asing seperti komunisme dan kapitalisme melalui pembuatan kebijakan dengan membentuk masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip “sosialisme, persatuan, dan kebebasan” (D.H., Agung, 2011, hal. 74).

Melalui pemikirannya tersebut Qadhafi berhasil memengaruhi masyarakatnya terbukti tepat di bulan Desember 1979 massa yang menganggap dirinya anti Amerika melakukan demonstrasi *pro-Iran* di depan gedung Kedutaan Amerika Serikat di Tripoli (D.H., Agung,

2011, hal. 74-75). Hal tersebut tentunya membuat hubungan Amerika Serikat dan Libya menjadi buruk.

Selain itu, Qadhafi juga melakukan reformasi terhadap kontrak-kontrak kerjasama dengan perusahaan-perusahaan asing yang menguasai sektor minyak Libya pada tahun 1970an dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan perusahaan asing sehingga monopoli perusahaan asing dapat dikendalikan dan menciptakan perekonomian yang mandiri. Selain itu, Qadhafi juga membuat kebijakan menutup pangkalan-pangkalan militer asing dan menasionalisasikan bank-bank asing yang ada di Libya (Martinez, 2010, hal. 563). Kebijakan-kebijakan tersebut merepresentasikan bahwa Qadhafi yang sangat anti dan tidak ingin berurusan dengan Barat lagi dan Libya kemudian menjadi negara yang tidak mengacu pada nilai-nilai Barat.

Pada tahun 1980an hubungan kedua negara semakin mengalami kerenggangan karena peristiwa penembakan dua pesawat Libya di tahun 1981 oleh angkatan laut Amerika Serikat di atas wilayah perairan internasional Teluk Sidra. Di tahun yang sama, Amerika Serikat juga menarik perwakilan diplomatiknya dari Tripoli. Kemudian setahun setelahnya yaitu tahun 1982 Amerika Serikat melakukan kebijakan embargo impor minyak Libya yang mana perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tidak boleh membeli minyak dari Libya dan juga menghentikan pengiriman peralatan teknologi minyak ke Libya (Pike, 2013).

Tidak hanya berhenti sampai disitu, konflik kedua negara beranjut pada tahun 1986 ketika angkatan laut Amerika Serikat merusak dua kapal Libya dan melakukan pasukan militernya melakukan penyerangan dan pengeboman di 2 kota besar Libya yaitu Tripoli dan Benghazi termasuk markas tentara Libya yang juga merupakan rumah dari Qadhafi. Tindakan pengeboman tersebut dilakukan oleh Amerika Serikat karena menduga bahwa Libya yang menjadi dalang di balik meningkatnya terorisme di Eropa (Vandewalle, 2006, hal. xxi-xxiii).

Libya diduga telah mendukung kelompok-kelompok teroris non-Arab tahun seperti tentara Irlandia, Brigade Merah Italia (BR) dengan memasok senjata dan bahan peledak. Selain itu, Libya juga diketahui sering menyuplai senjata dan melatih pejuang palestina untuk melawan Israel, salah satunya ketika terjadi penyerangan pesawat El Al milik Israel oleh gerilyawan palestina pimpinan Abu Nidal di Bandara Roma (Italia) dan Wina (Austria). Lima warga negara Amerika Serikat menjadi korban dalam tragedi tersebut sehingga Amerika Serikat saat itu menuduh Libya yang menjadi sponsor di balik penyerangan tersebut dan sebagai negara penyokong terorisme (D.H., Agung, 2011, hal. 34).

Kedadaan Libya diperparah ketika terjadinya peristiwa pengeboman pesawat Pan-Am Amerika Serikat tahun 1988 di Lockbire, Skotlandia yang menewaskan 270 orang. Peristiwa tersebut dianggap sebagai bentuk balas dendam Libya terhadap Amerika Serikat pada kasus pengeboman yang telah menewaskan putri dan saudara Qadhafi tahun 1986. Sehingga kejadian tersebut kemudian menempatkan Libya

sebagai Negara yang harus bertanggungjawab atas insiden tersebut karena dua orang warga Libya lah yang diduga menjadi tersangka (Sihbudi M. R., 1993, hal. 90-91).

Namun, Libya enggan untuk menyerahkan kedua warganya tersebut sehingga membuat Libya mendapatkan sanksi internasional dari PBB melalui resolusi 748 dan 883 tahun 1992/1993, yaitu berupa pembekuan aset-aset, embargo perlengkapan penambangan minyak secara selektif, embargo udara dan senjata serta pemutusan hubungan diplomatik yang membuat Libya semakin terkucilkan dan terisolasi dari dunia internasional (Sihbudi M. R., 1993, hal. 90-91). Keadaan ini tentunya tambah memperburuk hubungan Libya dengan Amerika Serikat Kemudian di tahun 1989, Amerika Serikat melakukan embargo total. Amerika Serikat secara tegas menghentikan semua bentuk kerjasama perdagangan dengan Libya, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Libya juga ditutup (D.H., Agung, 2011, hal. 47).

Akibat dari sanksi-sanksi yang diberikan, kondisi politik dan ekonomi di Libya menjadi tidak stabil, menciptakan rasa kerentanan yang ekstrem. Libya mengalami kerugian besar yang menyebabkan terjadinya krisis, kekuatannya menurun. Keadaan ini mendorong masyarakat melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut adanya perubahan. Rezim Qadhafi yang tidak bisa lagi berbuat banyak menyelesaikan masalah ketidakstabilan yang melanda Libya akhirnya di tahun 1999 bersedia menyerahkan dua warganya yang menjadi tersangka dalam kasus pengeboman pesawat Pan-Am untuk diadili di

Belanda. Penyerahan tersebut menjadi langkah besar bagi Libya agar terbebas dari sanksi yang telah diberikan oleh DK PBB (Simonsapril, 1999).

Sejak saat itu Libya mulai melakukan normalisasi hubungan dengan negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat karena perlunya bantuan pihak lain bagi Libya untuk kemajuan negaranya. Upaya normalisasi hubungan kedua negara mulai dilakukan sejak pemerintahan Presiden Bush ditandai dengan dukungan Libya melawan aksi terorisme pasca kejadian 9/11 tahun 2001. Pada tahun 2003, Qadhafi bersedia menghentikan program nuklirnya dan menyerahkan senjata pemusnah massalnya yang selama ini disembunyikan dan menjadi awal yang baik bagi babak baru hubungan kedua negara (Zoubir, 2011, hal. 114-115).

Selanjutnya, Amerika Serikat melakukan pencabutan sanksi ekonomi terhadap Libya pada tahun 2004 sehingga masyarakat dan perusahaan Amerika Serikat dapat kembali melakukan bisnis dan berinvestasi di Libya. Bersamaan dengan itu, Amerika Serikat juga kembali membuka kantor perwakilan diplomatiknya di Tripoli begitu juga dengan Libya di Amerika Serikat. Normalisasi hubungan kedua negara secara penuh dilakukan pada tahun 2006 dengan resmi mengganti kantor perwakilan diplomatik menjadi kantor kedutaan resmi dan menghapuskan Libya dari daftar negara terorisme (Zoubir, 2011, hal. 114-115).

2.1.2. Hubungan Amerika Serikat dan Libya Pada Masa Transisi Pemerintahan Bush Ke Barack Obama

Pada masa pemerintahan Bush hubungan Amerika Serikat mulai mengalami perbaikan. Amerika Serikat sadar akan pentingnya kerjasama dengan Libya sebagai salah satu negara yang berpengaruh di kawasan Afrika. Oleh karena itu, berbagai kesepakatan normalisasi hubungan kedua negara terus dilakukan, seperti kerjasama dalam kontraterorisme, perdagangan, energi, stabilitas regional, proliferasi nuklir, hak asasi manusia, demokrasi dan reformasi ekonomi di Libya (Gosa, 2013, hal. 22-37). Sebelum berakhir masa jabatannya, Bush menguatkan hubungan Amerika Serikat dengan Libya melalui Perjanjian Kerjasama Sains dan Teknologi yang ditandatangani pada tanggal 3 Januari 2008. Perjanjian bilateral ini merupakan perjanjian kerjasama pertama yang dilakukan semenjak penurunan hubungan diplomatik kedua negara (Office of the Spokesman, 2008).

Pada tanggal 14 Agustus 2008, Amerika Serikat dan Libya menandatangani perjanjian penyelesaian klaim komprehensif terkait pemberian kompensasi penuh untuk korban pengeboman Lockerbie 1988 dan pengeboman diskotik di Berlin dan klaim Libya yang timbul dari tindakan militer Amerika Serikat di Tripoli dan Benghazi pada tahun 1986. Masih di tahun 2008, Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui *Department's Export Control and Border Security* menyelenggarakan program pelatihan tentang larangan maritim dan keamanan kontainer dan pelabuhan. Terdapat sekitar 50 warga Libya

dan petugas bea cukai yang dilatih langsung oleh U.S. Department of Homeland Security. Adapun program ini disponsori oleh *Bureau of International Security and Nonproliferation* Amerika Serikat senilai 300.000 USD (Davenport, 2018).

Pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama upaya normalisasi hubungan kedua negara terus berlanjut. Di awal periode kepemimpinannya tepatnya pada bulan Januari 2009, Obama memperkuat hubungan Amerika Serikat dan Libya dengan menandatangani sebuah perjanjian mengenai kerja sama pertahanan yang fokus dalam pemeliharaan perdamaian, keamanan maritim, kontraterorisme, dan keamanan serta stabilitas Afrika. Kemudian, pada bulan Mei 2010, Amerika Serikat dan Libya meningkatkan kerjasama bilateral kedua negara dengan resmi menandatangani Perjanjian Kerangka Kerja Investasi Perdagangan (U.S. Departement of States, 2012).

Namun selama rentang tahun 2009-2010 menurut data dari U.S. Departement of States, pemerintah Amerika Serikat tidak memberikan bantuan finansial kepada Libya. Meskipun bantuan finansial tersebut sebenarnya sudah dianggarkan, namun pada praktiknya bantuan tersebut tidak direalisasikan (US Departement of State, t.t.). Terpilihnya Barack Obama sebagai Presiden pada saat itu bertepatan dengan terjadinya krisis ekonomi Amerika Serikat, sehingga fokus utama pemerintahan Obama di awal masa pemerintahannya lebih kepada bagaimana membawa Amerika Serikat keluar dari krisis ekonomi yang

sedang dihadapi (Hornick, 2008). Hal ini yang menjadi salah satu faktor penyebab tidak adanya bantuan yang diberikan Amerika Serikat ke Libya.

Dalam sebuah wawancara dengan *Wolf Blitzer* di *Des Moines*, Obama mengemukakan lima hal yang akan menjadi agenda prioritas di awal masa jabatannya, yaitu menstabilkan sistem keuangan dengan memastikan bahwa sistem perbankan dan keuangan terus berjalan; meningkatkan kemandirian energi; reformasi pelayanan kesehatan, reformasi pajak dengan memberikan pemotongan pajak pada kelas menengah; dan reformasi sistem pendidikan (Hornick, 2008). Pernyataan Obama tersebut memperlihatkan bahwa pada tahun pertama Obama menjabat lebih fokus untuk menuntaskan masalah dalam negerinya dan membangkitkan kembali perekonomian negara.

Sementara itu untuk agenda politik luar negerinya pemerintahan Obama justru lebih berkonsentrasi kepada adalah Pakistan dan Afghanistan untuk memberantas kelompok-kelompok terorisme, yaitu Taliban dan Al-Qaeda demi menjaga keamanan internasional. Komitmen Obama ini di jelaskan dalam pidatonya pada tanggal 27 Maret 2009:

“So I want the American people to understand that we have a clear and focused goal: to disrupt, dismantle, and defeat al Qaeda in Pakistan and Afghanistan, and to prevent their return to either country in the future. That is the goal that must be achieved. That is a cause that could not be more just. And to the terrorists who oppose us, my message is the same: we will defeat you.” (Obama, 2009).

Berdasarkan pernyataan Obama di atas terlihat jelas bahwa di periode awal pemerintahannya, Libya tidak menjadi prioritas yang cukup penting bagi Amerika Serikat. Namun hal itu kemudian berubah ketika gejolak *Arab Spring* merembet ke Libya pada tahun 2011. Peristiwa tersebut menimbulkan dilema serta kekhawatiran bagi arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Libya. Gerakan revolusioner yang menuntut keadilan, kebebasan dan reformasi kepada pemimpin diktator Qadhafi berganti menjadi perang saudara. Pemerintahan yang berkuasa merespon tuntutan rakyat dengan tindakan represif yang menimbulkan ketidakstabilan politik dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap masyarakat sipil. Lebih dari 1000 demonstran anti Qadhafi menjadi korban kekerasan kelompok pro pemerintah (Yon Machmudi, 2016, hal. 158).

Kondisi tersebut lantas membawa Amerika Serikat merasa perlu berperan sebagai polisi dunia untuk melindungi masyarakat sipil Libya. Amerika Serikat merasa mendapat mandat untuk bertindak, dan mendengar seruan bantuan orang-orang Libya. Obama menegaskan dalam pidatonya bulan Maret 2011 menanggapi Situasi di Libya:

“...And that’s why the United States has worked with our allies and partners to shape a strong international response at the United Nations. Our focus has been clear: protecting innocent civilians within Libya, and holding the Qaddafi regime accountable;... I also want to be clear about what we will not be doing. The United States is not going to deploy ground troops into Libya. And we are not going to use force to go beyond a well-defined goal -- specifically, the protection of civilians in Libya. In the coming weeks, we will continue to help the Libyan people with humanitarian and economic assistance so that they can fulfill their aspirations peacefully....” (Obama, 2011).

Pernyataan yang diungkapkan Obama dalam pidato tersebut menandai keseriusan kebijakan Amerika Serikat untuk membantu masyarakat Libya keluar dari rezim kediktatoran Qadhafi dan secara perlahan menuju negara demokrasi. Amerika Serikat mengutuk tindakan Qadhafi yang melawan rakyatnya sendiri dan menimbulkan korban kekerasan dalam skala terbesar. Dalam menanggapi konflik di Libya tersebut, Amerika Serikat menggunakan semua pengaruhnya melalui kerjasama dengan masyarakat internasional dan bergabung membentuk sebuah koalisi internasional untuk campur tangan dalam melawan Qadhafi (Fitzgerald, 2011, hal. 1-24). Resolusi yang dikeluarkan Dewan Keamanan PBB dalam menanggapi konflik di Libya pun menjadi pintu gerbang Amerika Serikat untuk ikut intervensi dalam menyelesaikan konflik di Libya.

Kegagalan rezim Qadhafi dalam melindungi rakyatnya dan justru melakukan kejahatan kemanusiaan dan menimbulkan kekacauan di negaranya ini menjadi justifikasi Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk menyelesaikan konflik di Libya (Joy, 2011, hal. 3). Terdapat dua resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB dalam menanggapi konflik di Libya ini. Pertama adalah resolusi 1970 yang dikeluarkan pada 26 Februari 2011. Resolusi ini berisi mengenai keprihatinan serius pada situasi di Libya, mengutuk kekerasan dan penggunaan kekuatan melawan warga sipil, penindasan terhadap demonstran dan pelanggaran hak asasi manusia, serta embargo dan instruksi gencatan senjata (Sarah Brockmeier, 2016, hal. 116).

Resolusi tersebut menuntut agar rezim yang berkuasa segera mengakhiri kekerasan, memenuhi tuntutan rakyat, dan mendesak pemerintah Libya untuk tidak bertindak ekstrim, menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional kemanusiaan, serta menjamin keamanan warga negara asing dan amannya pasokan kemanusiaan dan medis. Melalui resolusi 1970 ini, Qadhafi juga diberikan sanksi pembekuan terhadap aset dan memberlakukan larangan perjalanan terhadap Qadafi (Chilaka Francis Chigozie, 2013, hal. 5-7). Namun Resolusi DK PBB 1970 tersebut tidak berpengaruh bagi rezim yang berkuasa untuk berhenti membungkam pemberontak sehingga kemudian DK PBB kembali mengeluarkan Resolusi 1973 pada tanggal 17 Maret.

Resolusi 1973 ini memberi otorisasi "perlindungan warga sipil" dan "zona larang terbang" dan perlu dilakukannya intervensi kemanusiaan. Konflik yang terjadi di Libya dianggap sebagai ancaman perdamaian dan keamanan internasional dan dengan demikian diberi wewenang negara anggota atau organisasi regional mereka untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk melindungi warga sipil. Oleh karena itu, atas dikeluarkannya resolusi ini memberikan legitimasi kepada Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris untuk memimpin operasi untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Libya melalui intervensi kemanusiaan (Jeremiah Gertler, 2011, hal. 2-4).

Setelah membahas hubungan Amerika Serikat dan Libya sebelum revolusi, dan pada masa transisi pemerintahan Bush ke Obama di sub bab pertama ini, maka pembahasan mengenai hubungan kedua negara serta bagaimana kebijakan Amerika Serikat di Libya pada saat dan pasca revolusi akan dibahas di subbab selanjutnya.

2.2. KONDISI DAN KEBIJAKAN OBAMA PADA SAAT DAN PASCA REVOLUSI

Berbekal dari resolusi 1970 dan 1973 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB dalam merespon konflik yang terjadi di Libya, Amerika Serikat bersama pasukan koalisi kemudian membentuk operasi militer yang bertujuan untuk mencegah serangan lebih lanjut oleh pasukan rezim Qadhafi terhadap warga Libya dan kelompok oposisi. Tidak hanya melalui operasi militer, Amerika Serikat juga memberikan berbagai bantuan baik itu ekonomi, keamanan maupun dalam bantuan pembentukan pemerintahan untuk membantu Libya keluar dari konflik yang berkepanjangan menuju negara demokratis. Dalam sub bab ini akan menjelaskan mengenai berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Amerika Serikat dalam membantu proses transisi Libya. Penjelasan mengenai kebijakan-kebijakan tersebut dalam sub bab ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu kebijakan militer *Operation Odyssey Dawn*, kebijakan keamanan dan kebijakan pembentukan pemerintahan dan pembangunan ekonomi.

2.2.1. Kebijakan *Operation Odyssey Dawn*

Operation Odyssey Dawn ini beroperasi di bawah wewenang Dewan keamanan PBB melalui resolusi 1973 dimana Amerika Serikat menjadi komando utama yang akan mengatur strategi mengenai intervensi militer dan mengkoordinasikan misi antara anggota koalisi dalam operasi tersebut. Dalam menjalankan *Operation Odyssey Dawn* ini, Amerika Serikat tidak bekerja sendiri tetapi akan bekerjasama dengan NATO, AFRICOM, Liga Arab, Eropa dan membentuk *Joint Task Force Odyssey Dawn (JTF OD)* bersama *USS Mount Whitney* yang bertugas untuk memberikan kontrol operasional dan perintah taktis dalam pelaksanaan operasi militer tersebut (Mueller, 2015, hal. 114).

Satu hari sebelum pelaksanaan *Operation Odyssey Dawn*, yaitu pada tanggal 18 Maret 2011 Presiden Obama memberikan pidato mengenai langkah kebijakan Amerika Serikat yang akan diterapkan di Libya. Dalam pidato tersebut Obama dengan jelas dan tegas menyatakan keseriusan Amerika Serikat terhadap Libya :

“In the face of this injustice, the United States and the international community moved swiftly. Sanctions were put in place by the United States and our allies and partners. The U.N. Security Council imposed further sanctions, an arms embargo, and the specter of international accountability for Qaddafi and those around him. Humanitarian assistance was positioned on Libya’s borders, and those displaced by the violence received our help. Ample warning was given that Qaddafi needed to stop his campaign of repression, or be held accountable. The Arab League and the European Union joined us in calling for an end to violence” (Obama, 2011).

Operation Odyssey Dawn ini dimulai pada tanggal 19 Maret 2011 yang dilakukan dengan membentuk komando udara di sepanjang pantai Libya terutama di wilayah kota-kota besar, seperti Benghazi sebagai pusat dari pemberontakan. Amerika Serikat bersama pasukan koalisi melakukan serangan udara, lebih dari 100 rudal *Tomahawk* diluncurkan di sepanjang pantai Libya. Operasi pertama ini berhasil melemahkan pasukan Qadhafi dan menghancurkan pertahanan dan infrastruktur militer pasukan Qadhafi (Townsend, 2011).

Hal tersebut dilakukan untuk mencegah perluasan tindakan kekerasan yang dilakukan Qadhafi kepada rakyatnya sendiri. Kemudian pada tanggal 22 Maret berdasarkan kesepakatan bersama aliansi NATO mendapatkan mandat terbatas untuk mengambil alih komando embargo senjata maritim dan komando operasi udara. Berlandaskan atas mandat yang diberikan tersebut, pada tanggal 23 Maret 2011 NATO akhirnya memberlakukan embargo senjata dan pada tanggal 24 Maret 2011 memberlakukan zona larangan terbang. Operasi militer *Odyssey Dawn* ini berlangsung hingga tanggal 31 Maret 2011 sebelum akhirnya operasi ini diserahkan sepenuhnya kepada NATO (The CNN Wire Staff, 2011).

Sejak awal dalam operasi militer di Libya ini Obama melangkah sangat hati-hati. Presiden Obama tidak ingin begitu terlihat berkontribusi sehingga Obama mencoba meminimalkan peran Amerika Serikat dengan hanya melakukan tindakan militer terbatas, yaitu tidak menurunkan pasukan militer angkatan darat ke lapangan. Oleh karena

itu setelah operasi penyerangan pertama pada tanggal 19 Maret 2011, Amerika Serikat berusaha tidak mendominasi dengan melakukan kesepakatan bersama aliansi untuk melakukan transisi komando ke NATO dan mengizinkan Inggris dan Prancis memimpin (Jeremiah Gertler, 2011, hal. 7).

Secara resmi pada tanggal 31 Maret 2011 NATO mengumumkan bahwa seluruh operasi militer di Libya akan diambil alih dan dipegang oleh NATO dan menjadi hari terakhir bagi *Operation Odyssey Dawn* beroperasi. Semua operasi militer selanjutnya baik mengenai embargo senjata maupun operasi udara yang mencakup pemberlakuan zona larangan terbang dan operasi untuk melindungi warga sipil akan berada di bawah komando dan kontrol NATO. Operasi ini kemudian diberi nama dengan *Operation Unified Protection* (Garamone, 2011).

Meskipun semua kendali dan komando diambil alih oleh NATO namun Amerika Serikat masih terus memainkan peranan kunci dalam *Operation Unified Protector* tersebut. Presiden Obama memang berprinsip bahwa Amerika Serikat akan membatasi partisipasinya secara langsung namun akan tetap mendukung segala upaya yang dilakukan oleh lembaga internasional, baik itu PBB, NATO, Liga Arab dan negara-negara aliansi lainnya untuk menyelesaikan konflik di Libya. Setelah pada *Operation Odyssey Dawn* sebelumnya Amerika Serikat membatasi operasi militernya dengan tidak menurunkan pasukan militer angkatan darat ke lapangan (Witter, 2011, hal. 9).

Pada *Operation Unified Protector* ini Amerika Serikat membatasi partisipasinya dengan menjadi peran pendukung dalam menyediakan peperangan elektronik, pengisian bahan bakar udara, pencarian dan penyelamatan, pemulihan personil, kemampuan logistik, dukungan intelijen, pengawasan dan pengintaian, serta sebuah paket peringatan siaga dan dukungan tenaga kerja di tiga markas besar NATO. Sejak April hingga Juni 2011 beberapa kali pesawat tempur Amerika Serikat juga ikut melakukan serangan udara untuk menekan pertahanan udara rezim Qadhafi sebagai bagian dari zona larangan terbang (Witter, 2011, hal. 9).

Berbagai upaya penekanan terus dilakukan oleh Amerika Serikat, NATO dan negara-negara koalisi untuk memukul mundur Qadhafi turun dari jabatannya. Hingga akhirnya pada tanggal 20 Oktober 2011 pemimpin Libya tersebut tewas di Sirte setelah mendapat serangan dari militer Prancis. Sebelas hari setelah tewasnya Qadhafi, yaitu pada tanggal 31 Oktober *Operation Unified Protector* resmi ditutup dengan aksi penerbangan terakhir NATO *Airborne Early Warning and Control Aircraft* (AWACS) (Karl P. Mueller, 2015). Menurut laporan dari Departemen Pertahanan Negara biaya Departemen Pertahanan untuk operasi militer dan upaya bantuan kemanusiaan Amerika Serikat di Libya setiap bulannya mencapai enam puluh sampai delapan puluh juta USD dan pada September 2011 mencapai 1,1 miliar USD (Zenko, 2011).

2.2.2. Kebijakan Keamanan dan Perdamaian

Setelah selama delapan bulan Libya dilanda perang saudara antara pihak pro Qadhafi dan pihak oposisi, tanggal 20 Oktober 2011 merupakan fase baru bagi perjalanan Libya menuju demokrasi. Namun sepertinya peralihan menuju pembangunan negara yang demokratis akan lebih sulit dibandingkan mengambil alih kekuasaan politik Qadhafi. Munculnya kelompok-kelompok bersenjata non-negara pasca konflik di Libya menjadi hambatan bagi pemerintah sementara karena tentunya akan mengganggu kondisi keamanan dan proses transisi Libya (Christopher S. Chivvis, 2014, hal. 7-10).

Ledakan bom, serangan bersenjata, berbagai aksi serangan bom bunuh diri dan konflik berdarah atau saling serang antar-kelompok yang pro dan kontra, juga perang antara pasukan revolusi dan milisi bersenjata telah menjadi pemandangan sehari-hari. Kondisi Libya yang masih diwarnai ketegangan seperti ini menjadi salah satu tantangan karena hal tersebut membuat keadaan nasional Libya tidak stabil (Blanchard, September 2012, hal. 1-4).

Kondisi ini membuat pemerintahan Obama sepakat untuk memberikan dukungan melalui program bantuan perdamaian dan keamanan untuk Libya agar dapat menjaga kestabilan negaranya. Berdasarkan laporan dari Departemen Negara Amerika Serikat pada tahun 2011 alokasi anggaran yang disiapkan oleh Presiden Barack Obama untuk operasi luar negeri dalam mendanai Libya adalah sekitar 875,000 ribu USD. Anggaran tersebut terbagi menjadi beberapa bagian,

yaitu USD275,000 ribu untuk *Nonproliferation Antiterrorism, Demining, and Related Programs* (NADR), 350,000 ribu USD untuk *International Military Education and Training* (IMET), 250,000 ribu USD untuk *Foreign Military Financing* (FMF) (Blanchard, Juli 2010, hal. 12).

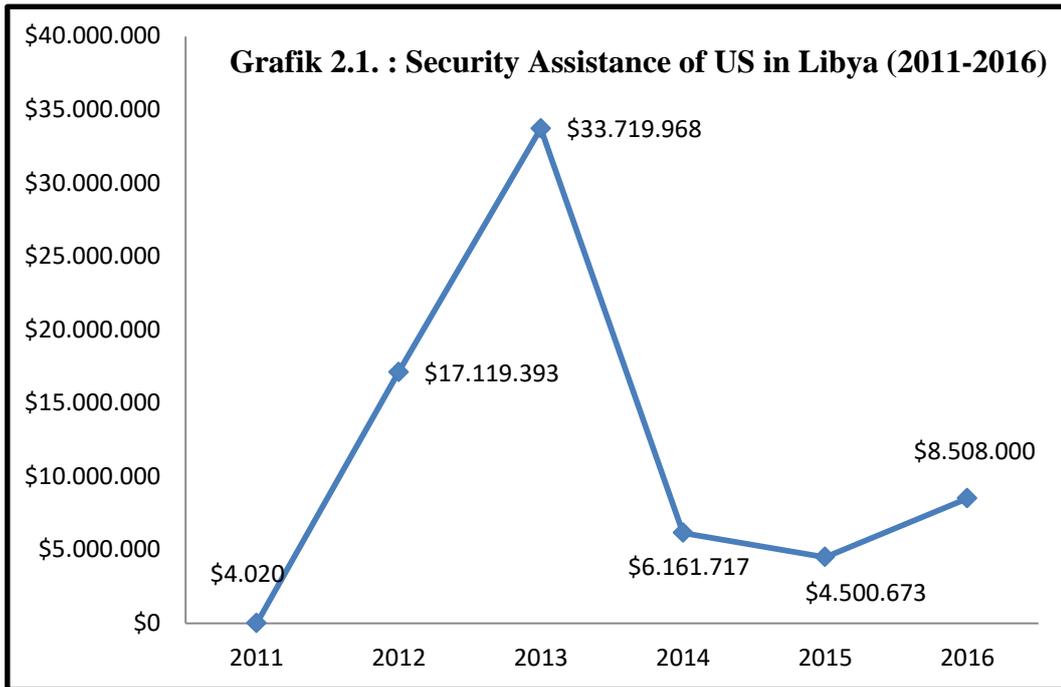
Melalui pendanaan program NADR, Amerika Serikat memberikan bantuan pelatihan dan teknis yang berkerjasama dengan *Export Control And Related Border Security* (EXBS) untuk membantu Libya mengembangkan kapasitas dalam mengidentifikasi teknologi terkait *Weapon Mass Distraction* (WMD) dan memerangi jaringan teroris transnasional, membantu dalam menyusun atau pun memperbaharui terkait undang-undang dan daftar kontrol pengendalian perdagangan strategis untuk impor dan ekspor yang komprehensif, dan menyediakan peralatan inspeksi dan deteksi (U.S. Department of State, 2011, hal. 81).

Selanjutnya pendanaan untuk program FMF akan digunakan untuk mendukung pengembangan kapasitas armada transportasi Angkatan Udara Libya sehingga Libya dapat meningkatkan keterlibatannya dalam operasi penjaga perdamaian dan kemanusiaan di wilayah Afrika Utara. Sedangkan untuk pendanaan program IMET akan digunakan untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pasukan keamanan Libya, yaitu berupa peningkatan kapabilitas bahasa Inggris, pengetahuan tentang hubungan militer dan sipil, keamanan perbatasan, dan kontraterorisme. Program pelatihan tersebut sebagai langkah

strategis yang bias dilakukan untuk mendorong Libya memahami mengenai praktik demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan partisipasi masyarakat sipil. (Departement Of State, 2011, hal. 497).

Hingga September 2012 pemerintah Amerika Serikat mengalokasikan dana bantuan untuk Libya lebih dari 200 juta USD termasuk bantuan kemanusiaan sebesar 89 juta USD, 40 juta USD untuk pengurangan senjata, dan 25 juta USD bantuan nonlethal dari Departemen Pertahanan. Alokasi bantuan ini diberikan oleh pemerintah Barack Obama kepada Libya untuk memusnahkan senjata, termasuk senjata ringan, bahan peledak, dan rudal anti pesawat terbang berbahu atau *Man-Portable Air-Defense Systems* (MANPADs) serta mencegah proliferasi persenjataan militer yang tanpa jaminan. Selain itu Amerika Serikat juga menyediakan dana 11,8 juta USD untuk mengembangkan pasukan khusus yang dapat melakukan misi kontraterorisme dan untuk memperbaiki pengelolaan keamanan perbatasan (Blanchard, September 2012, hal. 1-5).

Untuk lebih rincinya, berikut akan disajikan grafik terkait anggaran Amerika Serikat untuk kebijakan keamanan dan perdamaian di Libya dari tahun 2011- 2016 :



Sumber : (Security Assistance Monitor, 2011-2016)

Kemudian Amerika Serikat juga bekerjasama dengan PBB memberikan bantuan *Disarmament, Demobilization dan Reintegration (DDR)* yang diberikan melalui saluran diplomatik dalam bentuk dukungan penasehat dan pemantauan secara intensif, pelatihan khusus untuk perwira militer tingkat menengah maupun tinggi. Amerika Serikat mengajak kerjasama Negara-negara Arab seperti Yordania dan Maroko untuk ikut membantu melatih pejuang pemberontak Libya dan mengintegrasikan mereka ke dalam tentara nasional. Amerika, Inggris, dan Italia akan melatih tentara Libya sekitar lima sampai delapan ribu personil untuk menjaga keamanan Libya (El-Katiri, 2012, hal. 38).

Sementara itu, untuk dana kemanusiaan yang dikucurkan oleh Amerika Serikat sejak tahun 2012 hingga 2016 mencapai lebih 121 juta USD total bantuan. Bantuan yang diberikan ini untuk membantu masyarakat yang kehilangan tempat tinggal, memenuhi kebutuhan pokok, seperti penyediaan makanan, air minum, perawatan medis, alat kebersihan, dan barang-barang rumah tangga dasar kepada orang-orang yang terkena dampak konflik revolusi sejak tahun 2011 (U.S.DoS, 2016).

2.2.3. Pembentukan Pemerintahan dan Pembangunan Ekonomi

Sejak jatuhnya rezim pemerintahan Qadhafi pada Oktober 2011, Libya telah dihadapkan dengan masalah baru, yaitu terjadinya perpecahan politik dalam pemerintahan nasional Libya dan belum adanya kejelasan arah transisi yang akan membawa masyarakat Libya menjadi lebih baik. Kekosongan kursi pemerintahan daerah maupun nasional membuat ketidakstabilan politik di Libya. Perbedaan cara pandang terkait arah pembangunan Libya menjadi masalah kompleks karena kemajemukan struktur dan golongan masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, ideologi dan kepentingan sehingga menyebabkan perebutan pengaruh dan kekuasaan (Nainggolan, 2011, hal. 7).

Persaingan perebutan kekuasaan untuk menduduki kursi kepemimpinan juga disebabkan karena kurangnya orang-orang yang berkompeten untuk mengisi pemerintahan. Situasi dinamika sosial dan politik didasarkan pada perbedaan kepentingan, identitas dan loyalitas mengakibatkan persaingan baik itu antar kota, wilayah, suku (termasuk

faksi dan keluarga), faksi politik dan orientasi *religious* (Tim Molesworth, 2015, hal. 10-12). Pasca revolusi, keterlibatan Amerika Serikat di Libya tidak berhenti begitu saja, tetapi terus memberikan pendampingan dengan bantuan program transisi pemerintahan.

Sebagai sebuah negara yang bisa dikatakan baru lahir kembali Libya membutuhkan dukungan dari Amerika Serikat dan mitra internasional lainnya untuk memperkuat kapasitas dalam membangun rekonstruksi institusional dan pemerintahan yang representatif dan demokratis, membangun perekonomian Negara. Berikut adalah skema yang dirancang untuk membantu proses transisi Libya (Blanchard, Juli 2010, hal. 3) :

Gambar 2.1. Skema Perencanaan Proses Transisi Libya



Pada tanggal 15 Juli 2011 *National Transitional Council* (NTC) diakui secara resmi oleh Amerika Serikat sebagai pemerintahan sementara yang sah. NTC dipercaya untuk memegang kekuasaan karena pada saat itu pemerintahan Qadhafi sudah kehilangan legitimasi lagi dari rakyatnya (Departement of States, t.t.). NTC terus mendapatkan kredibilitas dan legitimasi tidak hanya oleh Amerika Serikat tetapi juga oleh negara-negara sekutu dan masyarakat Libya. Australia, Kanada, Jerman, Spanyol, dan Uni Emirates Arab juga telah ikut mengakui NTC (DoS, DoD, 2011, hal. 4).

Melalui NTC inilah kemudian Amerika Serikat menyusun visi dan mengajukan proposal mengenai pembentukan tata pemerintahan Libya pasca perang. Proposal yang diajukan ini berlandaskan pada nilai-nilai yang dianut oleh Amerika Serikat, yaitu mengacu pada nilai-nilai demokrasi dan liberalisme. Amerika Serikat merancang masa depan Libya menjadi sebuah negara demokrasi kapitalis. Dimana mengikuti model lembaga demokrasi gaya Barat dengan menekankan pada keterbukaan pasar (Muoneke, 2015, hal. 97).

Sebenarnya sejak awal perang, sebelum jatuhnya rezim Qadhafi, pemerintah Amerika Serikat telah menggandeng NTC dan mempersiapkannya sebagai pemerintah pengganti Qadhafi. Bersama dengan pemimpin perwakilan dari NTC dan negara-negara sekutu, Amerika Serikat melakukan pertemuan di Prancis untuk membahas masa depan Libya tanpa Qadhafi. Bahkan saat itu, pengaturan politik serta sistem ekonomi Libya yang baru telah disetujui oleh pemerintah

Amerika Serikat tanpa persetujuan dari rakyat Libya. Kemudian Amerika Serikat juga memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada NTC di Libya untuk mendukung program reformasi liberal (Randall, 2011).

Bagi Amerika Serikat mendukung legitimasi NTC menggantikan rezim Qadhafi setelah turun dari kekuasaannya, berarti membuka jalan untuk proses demokratisasi Libya. NTC dipercaya untuk menyusun proses transisi politik, yang mana mengacu pada aspirasi demokratis rakyat Libya dan melindungi hak asasi manusia semua warga Libya. Hal ini diperkuat dengan pernyataan NTC yang menyatakan niatnya untuk menghormati Konvensi Jenewa, penghormatannya terhadap hak asasi manusia, dan penolakan terhadap terorisme (DoS, DoD, 2011, hal. 22). Kemudian ketika perang sipil berakhir pada Oktober 2011, Presiden Obama berjanji untuk bekerja dengan pemerintah baru Libya sebagai mitra, dan menyatakan bahwa Amerika Serikat berkomitmen kepada rakyat Libya (Muoneke, 2015, hal. 5-6).

Pada tanggal 7 Juli 2012 untuk pertama kalinya setelah 50 tahun Libya melakukan pemilihan nasional. *General National Congress* (GNC) berhasil memenangkan pemilihan untuk menggantikan pemerintahan sebelumnya, yaitu NTC (*National Transitional Council*). Amerika Serikat kemudian mendukung *General National Congress* (GNC) sebagai pemerintahan terpilih yang akan menggantikan NTC. Sebagai pemimpin terpilih GNC kemudian memilih perdana menteri dan membentuk anggota kabinet baru untuk menyiapkan sebuah

konstitusi baru. Di bawah kepemimpinan GNC ini, Libya mulai menunjukkan ke arah yang lebih demokratis yang ditandai dengan berlangsungnya serangkaian pemilihan umum kepala daerah dan aktifnya kembali partai-partai politik. Meskipun demikian, perebutan kekuasaan antar faksi di Libya terus terjadi dan bahkan mengakibatkan perang saudara kembali terjadi (Gomez, 2012, hal. 13-16).

Oleh karena itu untuk membantu transisi politik Libya agar menghasilkan pemerintah nasional yang sah dan akuntabel, pada tahun 2015 *Government of National Accord* (GNA) dibentuk. Melalui pelaksanaan Perjanjian Politik Libya yang ditengahi PBB, GNA kemudian diakui secara resmi pada tanggal 17 Desember 2015 oleh komunitas internasional sebagai pemerintah resmi Libya. Bersama dengan Perancis, Jerman, Italia, Spanyol, dan Inggris, Amerika Serikat mendukung GNA sebagai satu-satunya pemerintah Libya yang sah di bawah Perjanjian Politik Libya yang telah disepakati (US Departement Of State, 2016).. Dukungan secara penuh ini dikemukakan dalam *joint statement* pemerintah kelima negara tersebut di atas :

“We remain committed to providing our full support to the Libyan people, to the PC, and the GNA led by Prime Minister Fayez al-Sarraj as they work to restore unity and rebuild Libya. We reiterate our full support for the ongoing work of UNSMIL and UN Special Representative of the Secretary-General for Libya Martin Kobler” (US Departement Of State, 2016).

Kemudian berbagai kucuran dana juga digelontorkan oleh Amerika Serikat sebagai bentuk komitmennya untuk membantu membangun institusi pemerintahan dan memperbaiki kehidupan rakyat Libya dengan melakukan rekonsiliasi politik, dan meningkatkan

kapasitas Libya untuk memerintah secara efektif melalui pengadaan pemilihan yang bebas dan adil, mengamankan wilayah Libya, dan mengelola keuangan publik secara transparan dan bertanggung jawab. Pembangunan yang dilakukan Amerika Serikat ini berfokus pada penguatan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan Libya dengan mendorong terciptanya sistem pemerintahan yang transparan dan lebih kredibel sehingga memudahkan untuk menavigasi transisi Libya menjadi lebih demokratis (Bureau Of Near Eastern Affairs, 2017).

Dalam mewujudkan hal tersebut, Amerika Serikat bekerjasama dengan pemerintah nasional, dewan kotamadya, pengusaha, dan berbagai kelompok masyarakat sipil, termasuk perwakilan dari perempuan, pengusaha maupun masyarakat minoritas (Bureau Of Near Eastern Affairs, 2017). Amerika Serikat terus memberikan bantuan dan dukungan kepada Libya untuk membangun institusi Libya yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kemanusiaan rakyat Libya. Serangkaian bantuan dan pemograman yang dilakukan Amerika Serikat juga dikoordinasikan dengan *United States Agency for International Development* (USAID) yang merupakan sebuah badan pembangunan internasional Amerika Serikat (USAID, 2017).

Melalui program transisi demokrasi di Libya ini, berbagai upaya telah dilakukan USAID untuk membantu meningkatkan kapabilitas masyarakat Libya dalam mengeluarkan pendapat mereka agar dapat didengar sehingga bisa ikut berpartisipasi dalam pembuatan dan penerapan konstitusi baru dan pelaksanaan pemilihan yang adil dan

damai. Selain itu, untuk meningkatkan jangkauan publik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan kondisi ekonomi dan sosial yang baik, USAID membantu pembentukan institusi nasional yang efektif yang mana dapat merespons kebutuhan masyarakat serta mendukung rekonsiliasi dan pemulihan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat, penguatan dewan kota, dan perbaikan infrastruktur skala kecil (USAID, 2017).

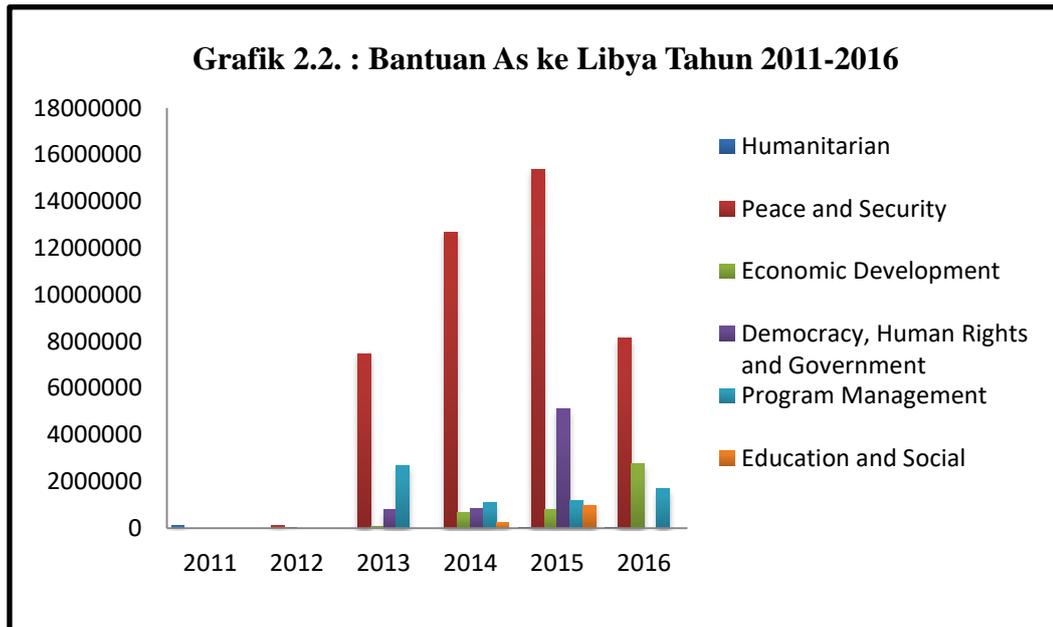
Pada periode tahun 2011-2014, pemerintah Amerika Serikat melalui USAID menyediakan lebih dari 25 juta USD untuk program mendukung kegiatan kelompok masyarakat sipil Libya dan memberikan bantuan teknis kepada badan administrasi pemilihan Libya yang baru terbentuk. Dana bantuan akan dikelola melalui Kantor Inisiatif Transisi dan akun regional (Blanchard, 2018, hal. 23-32). Kemudian melalui program USAID yang diberi nama *Supporting Consensus Building for the National Dialogue, Constitution Drafting and Governing Process in Libya (LCB)*, Amerika memberikan dana hibah sebesar 11,5 juta USD kepada *Freedom House and American Bar Association Rule of Law Initiative* untuk melaksanakan program tersebut selama jangka waktu 2014-2019 (USAID, t.t., hal. 1).

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam *Constitution Drafting Assembly (CDA)* terkait isu-isu penting seperti desentralisasi, peradilan, gender masalah, pemuda, dan sistem pemerintahan. Disamping itu, program ini membantu meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik tentang konstitusi,

struktur serta praktik tata pemerintahan nasional dan lokal melalui media sosial dan massa, pengembangan materi informasi, dan memfasilitasi diskusi baik dengan pemangku kepentingan utama maupun mitra kelembagaan (USAID, t.t., hal. 1).

Sebagai upaya membangun kohesi komunitas untuk memperbaiki tata kelola Libya, USAID membantu masyarakat Libya membentuk sebuah pusat komunitas. Salah satu contohnya adalah di Sabha yang mana pusat komunitas ini akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Pusat komunitas akan menjadi ruang yang netral dan mudah diakses untuk meningkatkan hubungan sosial yang baik dan kuat antara warga dan pemerintah daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dan kredibilitas serta menjaga legitimasi institusi lokal (USAID, t.t., hal. 1).

Selain itu, USAID juga membantu dalam memberdayakan perempuan seperti pembentukan Asosiasi Penasihat Kota Wanita yang bertujuan untuk menganalisis prinsip-prinsip pemerintahan daerah, pemberian layanan publik, dan tanggung jawab dewan kota untuk mencegah otoritarianisme bangkit lagi. Melalui partisipasi semua kelompok masyarakat tentunya akan mendorong stabilitas dan efektifitas institusi dalam menjalankan tugasnya (Meline, 2016). Lebih jelas mengenai bantuan dukungan dana Amerika Serikat terhadap Libya, berikut akan dilampirkan grafik bantuan Amerika Serikat dalam beberapa sektor dari tahun 2011- 2016 di Libya :



Sumber : (Department Of State, t.t.)

Pada tahun 2011 bantuan pemerintah Amerika Serikat untuk Libya hanya berupa bantuan *humanitarian* senilai 101.000 USD. Bantuan *humanitarian* ini terus berlanjut selama masa pemerintahan Obama hingga tahun 2016 yang fokus terhadap bantuan perlindungan dan solusi terkait kemanusiaan. Sementara itu dalam kategori *peace and security* bantuan Amerika Serikat terdiri dari stabilisasi dan operasi keamanan, mitigasi konflik dan rekonsiliasi, konter terorisme dan memerangi WMD (US Departement of State, t.t.).

Kemudian, untuk kategori *economic development* terdiri dari 4 sektor, yaitu sektor keuangan, memberikan kesempatan ekonomi, meningkatkan daya saing sektor swasta, memperluas perdagangan dan investasi. Selanjutnya dalam kategori *democracy, human rights and governance* bantuan Amerika Serikat terbagi menjadi bantuan pembentukan dan penegakan Hukum serta Hak Asasi Manusia,

membangun konsensus, meningkatkan kompetisi politik dan menciptakan pemerintahan yang baik. Dalam bidang *management* bantuan fokus pada pemberian bantuan biaya administrasi langsung dan terakhir untuk pendidikan, bantuan Amerika Serikat diprioritaskan pada peningkatan pelayanan sosial (US Departement of State, t.t.).

Meskipun berdasarkan grafik di atas bantuan pemerintah Amerika Serikat mengalami fluktuasi dan berbeda-beda setiap tahun, namun program kebijakan pemberian bantuan tersebut adalah wujud upaya pemerintah Amerika Serikat untuk mempromosikan dan memperkuat demokrasi di Libya yang dilakukan dengan penguatan diberbagai sektor seperti, kemanan, ekonomi, pemerintahan, dan pendidikan. Kebijakan tersebut secara tidak langsung secara perlahan akan mendukung agar proses demokrasi berlangsung secara efektif dan berkelanjutan menuju konsolidasi demokratis.

Selanjutnya Amerika Serikat juga bekerjasama dengan *Middle East Partnership Initiative (MEPI)* untuk mendukung transisi demokrasi Libya. Melalui MEPI berbagai bantuan teknis diberikan kepada partai politik untuk mendukung lingkungan yang kompetitif, inklusif dan multi-partisan. Selain itu, bantuan Amerika Serikat melalui MEPI ini juga memberikan pelatihan penyelenggaraan pemilu, pemberdayaan perempuan, pemahaman tentang hukum dan perlindungan hak warga. MEPI bekerja di Libya untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat nasional dan lokal,

mempromosikan supremasi hukum, dan membantu dalam memelihara masyarakat sipil yang dinamis (US Department of State, 2012).

Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki program pembangunan ekonomi melalui USAID, yaitu *Economic Stabilization for Libya* (ESL) dan *Libya Economic Empowerment* (LEE). Program ESL akan fokus pada bantuan teknis dan pengembangan kapasitas dalam manajemen keuangan publik (PFM), meningkatkan pengiriman listrik, dan mempercepat penciptaan lapangan kerja (USAID, 2018). Sedangkan LEE lebih kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama meningkatkan kemampuan kewirausahaan perempuan melalui pelatihan bisnis untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada (USAID, 2017).

Kemudian dalam upaya mewujudkan transisi demokrasi di Libya, Amerika Serikat juga bekerjasama dengan PBB, seperti melalui *United Nations Support Mission di Libya* (UNSMIL) dan mitra internasional lainnya (U.S. Department of State). Namun, warisan Qadhafi yang memanipulasi konstitusi Libya baik itu militer, kelompok suku, regional dan politik sehingga proses transisi institusi menjadi lemah karena dominasi dan persaingan antar kelompok yang telah ditempatkan oleh Qadhafi dalam institusi sebelumnya menjadi bersaing memperebutkan kekuasaan. Bahkan pemerintahan sementara yang terpilih mendapatkan legitimasi yang lemah karena telah gagal memenuhi dan memperbaiki layanan dasar masyarakat dengan cepat dan sesuai kebutuhan seperti jaminan keamanan, dukungan finansial

melalui subsidi, gaji dan bantuan (Blanchard, September 2012, hal. 8-9).

Permasalahan berikutnya yang terjadi adalah perbedaan pendapat antar otoritas lokal dan nasional yang menjadi sumber terjadinya konflik selama proses transisi (Blanchard, September 2012, hal. 8-9). Untuk menjadi sebuah negara yang demokrasi, pemilihan umum saja tidak akan menjamin karena reformasi yang sesungguhnya tidak hanya sampai pada kotak suara saja tetapi juga harus diikuti dan ditopang dengan institusi yang kuat dan akuntabel dan pembangunan ekonomi yang kuat. Hanya dengan reformasi politik tidak akan cukup untuk membawa perubahan positif bagi masa depan Libya (Office of the Press Secretary, 2011).

Mendorong kemajuan pembangunan ekonomi adalah salah satu faktor yang menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah Amerika Serikat mendorong adanya investasi dan mendukung keterbukaan pasar di Libya agar dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Libya dan kemudahan akses barang dan jasa. Tidak hanya itu Amerika Serikat juga akan memastikan stabilitas keuangan, mempromosikan reformasi ekonomi, dan mengintegrasikan pasar yang kompetitif satu sama lain dan ekonomi global (Office of the Press Secretary, 2011).

Overseas Private Investment Corporation (OPIC) yang merupakan sebuah lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bergerak untuk membantu para pebisnis Amerika Serikat dalam berinvestasi di pasar negara-negara berkembang juga memainkan peranannya dengan memberikan fasilitas dana senilai 2 miliar USD untuk mendukung investasi swasta wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara, termasuk untuk Libya (OPIC, 2011).

Pendanaan tersebut tidak hanya menargetkan perusahaan-perusahaan besar tetapi juga perusahaan kecil dan menengah agar perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki potensi untuk tumbuh menjadi lebih besar. Menurut Obama cara Amerika Serikat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara mendukung bisnis dan investasi adalah strategi yang pas sebagai salah satu jalan untuk membantu kemajuan transisi demokrasi, meningkatkan stabilitas, dan memperkuat kemitraan Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara termasuk Libya (OPIC, 2011).

Di tahun 2012 *State Department and Foreign Operations Appropriation* Amerika Serikat menyediakan dana sebesar USD 20 juta dalam bentuk bantuan *Economic Support Fund (ESF)*. Dukungan ESF ini bertujuan untuk mempromosikan demokrasi, pemerintahan yang transparan, akuntabel, hak asasi manusia, keadilan transisional, dan peraturan hukum di Libya, dan untuk program pertukaran antara mahasiswa dan profesional Libya dan Amerika (Blanchard, September 2012, hal. 11). Kemudian dalam peningkatan perekonomian dan

kesejahteraan masyarakat Libya, pada tahun 2012 Amerika Serikat memasukkan Libya ke dalam forum *Africa Diaspora Marketplace* (ADM), yaitu sebuah kemitraan publik-swasta yang akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja yang berkelanjutan (US Department of State, 2012).

Selain itu, Amerika Serikat juga membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan dan melaksanakan berbagai program pemberdayaan perempuan, pelatihan kepemimpinan, dan memberikan hibah kepada pebisnis wanita, serta membangun portal pendukung pengembangan bisnis yang dapat diakses oleh pengusaha untuk meningkatkan keterampilan mereka. Selanjutnya, Amerika Serikat memberikan bantuan teknis kepada pemerintah Libya dengan menjadi fasilitator dalam pertemuan bisnis dan perdagangan terutama terkait proyek-proyek infrastruktur publik. Tercatat bahwa pada tahun 2015 perdagangan dua arah antara Amerika Serikat dan Libya mencapai 400 juta USD (Bureau Of Near Eastern Affairs, 2017).

Bantuan pembangunan ekonomi yang diberikan Amerika Serikat ini bertujuan untuk membantu menciptakan pertumbuhan perekonomian Libya yang cepat dan berkelanjutan serta menciptakan liberalisasi pasar. Sementara itu, dalam menuntun Libya selama proses transisi menuju negara demokrasi strategi yang digunakan Amerika Serikat tidak hanya dengan mempererat hubungan *government to government*, tetapi justru lebih menguatkan jaringan antar *people to people*, seperti dalam bidang pendidikan. Melalui bidang pendidikan

Amerika Serikat meningkatkan koneksi *people to people* khususnya pemuda dengan melakukan pertukaran pelajar, beasiswa, pendidikan bahasa Inggris, saran pendidikan, pelestarian budaya, dan kunjungan jangka pendek dan pelatihan di Amerika Serikat (Wilson-Center, 2012).

Selama tahun 2012-2013, dalam rentang waktu satu tahun tersebut sebanyak 14 siswa yang berhasil mendapatkan beasiswa *fullbright* ke Amerika Serikat dari sekitar 1.700 pendaftar. Kemudian di tahun 2012 juga ada sekitar 30 pejabat pemerintah Libya, perwakilan pemuda dan masyarakat sipil, pemimpin perempuan, dan jurnalis yang ikut berpartisipasi selama tiga minggu di Amerika Serikat dalam program pengembangan *International Visitor Leadership Program (IVLP)* (Wilson-Center, 2012). Amerika Serikat juga mendukung akses terbuka ke Internet dengan kerjasama di bidang teknologi, serta pemenuhan hak-hak politik, ekonomi, sosial dan budaya, termasuk kesehatan anak dan ibu, pendidikan untuk perempuan, kebebasan berpendapat dan didengar, kesetaraan gender, dan hak untuk berpolitik.

Di atas telah dipaparkan mengenai dinamika hubungan Amerika Serikat dengan Libya dari yang bersifat konfliktual di bawah kekuasaan Qadhafi hingga upaya normalisasi kedua negara ketika masa pemerintahan Bush dan Obama melalui berbagai kesepakatan, dan akhirnya kembali lagi menjadi tegang saat gelombang *Arab Spring* terjadi. Libya yang pada awal masa pemerintahan Obama tidak menjadi fokus dan prioritas kemudian berubah mendapatkan perhatian utama ketika gelombang *Arab Spring* berhasil merembet ke Libya yang

menimbulkan gerakan revolusioner dan ketidakstabilan politik. Komitmen dan keterlibatan Amerika Serikat untuk menyelesaikan konflik dan mendukung transisi di Libya yang dimulai melalui resolusi DK PBB 1970 dan 1973 telah memengaruhi bagaimana dinamika hubungan kedua negara bisa berubah.

Dalam kasus ini Amerika Serikat hanya melakukan intervensi saat konflik di Libya dan tidak dengan negara-negara lain yang juga terkena *Arab Spring* seperti Tunisia dan Mesir sehingga ini menandakan bahwa ada indikasi kepentingan yang ingin dicapai oleh Amerika Serikat di Libya di luar alasan intervensi kemanusiaan. Berbagai kebijakan bantuan yang diberikan oleh Amerika baik ekonomi, pembangunan pemerintahan yang demokrasi merupakan strategi yang dirancang untuk dapat memberikan dampak yang efektif dan signifikan dalam mencapai kepentingan Amerika Serikat. Tindakan Amerika Serikat di Libya ini dapat kita analisis melalui pendekatan Realisme Demokratik di mana Amerika Serikat hanya akan melakukan intervensi dan menegakkan demokrasi di tempat-tempat yang memberikan peluang dan keuntungan yang maksimal yang dalam hal ini di Libya. Lebih jelasnya mengenai analisis Realisme Demokratik terhadap kebijakan Amerika Serikat dalam mewujudkan demokrasi di Libya akan di bahas dalam bab selanjutnya.